

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang diolah dan pembahasan yang dilakukan terkait tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, akuntabilitas, dan sistem pengendalian internal terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil dari uji t terlihat bahwa H_{a1} diterima dan H_{01} ditolak. Penelitian ini membuktikan bahwa tekanan eksternal berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Artinya semakin tinggi tingkat tekanan eksternal pada suatu SKPD maka penerapan transparansi pelaporan keuangan juga akan tinggi.
2. Hasil dari uji t terlihat bahwa H_{a2} diterima dan H_{02} ditolak. Penelitian ini membuktikan bahwa ketidakpastian lingkungan berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Artinya semakin tinggi ketidakpastian lingkungan pada lingkungan SKPD itu berada, maka SKPD tersebut akan berupaya untuk dapat menyesuaikan dengan keadaan barunya. Dengan adanya upaya tersebut SKPD akan mampu menghadapi ketidakpastian lingkungan yang terjadi.
3. Hasil dari uji t terlihat bahwa H_{a3} diterima dan H_{03} ditolak. Akuntabilitas berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Pembuatan laporan keuangan merupakan suatu bentuk kebutuhan transparansi dan merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya

publik. Pelaksanaan yang telah sesuai dengan UU yang berlaku akan menjadikan laporan keuangan akuntabel, sehingga laporan keuangan tersebut bisa dipertanggungjawabkan dan transparansi pelaporan keuangan juga akan semakin baik.

4. Hasil dari uji t terlihat bahwa H_{a4} diterima dan H_{04} ditolak. Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Artinya semakin baik sistem pengendalian internal pada suatu SKPD maka menjadi pemicu diterapkannya penerapan transparansi pelaporan keuangan.
5. Hipotesis kelima secara silmutan variabel tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, akuntabilitas, dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Hal ini disebabkan adanya kesesuaian dari masing-masing variabel, dan juga didukung secara parsial pada masing-masing variabel yang berhasil mempengaruhi penerapan transparansi pelaporan keuangan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya. Sehingga untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik. Berikut adalah keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini antara lain:

1. Peneliti tidak mendampingi responden dalam pengisian kuesioner secara langsung. Sehingga memungkinkan adanya ketidakpahaman dari responden ketika mengisi kuesioner tersebut.

2. Penelitian ini hanya menggunakan metode survei dengan instrumen kuesioner. Sehingga hasil yang didapat berdasarkan persepsi dari respondennya.
3. Tidak melibatkan bagian pengendalian internal dalam penelitian ini. Ruang lingkup hanya 1 daerah Kabupaten Ponorogo, sehingga tidak dapat menggambarkan kondisi daerah se-Jawa Timur.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian yang telah diuraikan diatas, maka peneliti memberikan saran yang dapat dipertimbangkan pada peneliti selanjutnya, antara lain:

1. Bagi Penelitian Selanjutkan
 - a. Peneliti selanjutnya diharapkan memilih responden yang berbeda, seperti menambah bagian kepala SKPD, atau seluruh pegawai dibagian keuangan untuk dijadikan responden sehingga responden penelitian ini akan semakin beragam dan banyak.
 - b. Peneliti selanjutnya diharapkan menambah luas wilayah penelitian pada kota/kabupaten lain, se-Karesidenan Madiun atau se-Provinsi Jawa Timur, sehingga bisa dijadikan perbandingan hasil penelitian pada daerah satu dengan yang lain.
 - c. Peneliti selanjutnya diharapkan mendampingi responden dalam pengisian kuesioner dan menjelaskan maksud dari tiap-tiap

pernyataan pada kuesioner tersebut, agar meminimalisir ketidakpahaman dan kesalahan dalam pengisian kuesioner.

2. Bagi SKPD

a. SKPD Kabupaten Ponorogo hendaknya tetap memberikan transparansi kepada publik.

b. SKPD Kabupaten Ponorogo lebih meningkatkan akuntabilitas dalam mempertanggung jawabkan, melaporkan, dan menyajikan kinerjanya kepada publik.

